

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang – undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang telah merumuskan kebijakan dan program – program mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pasal 15 disebutkan bahwa mengenai bantuan – bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Berdasarkan undang – undang tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia akhirnya pemerintah mengeluarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Didalamnya menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial maka perlu adanya program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam mengenai implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara sudah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Komunikasi yang terjalin antara pendamping dan juga KPM sudah sangat baik, tanggung jawab dan kinerja dari pendamping dan KPM juga sudah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya sumber daya sarana dan prasarana yang kurang memadai yaitu terkait sarana prasarana dalam pelaksanaan P2K2.

Kata Kunci: PKH, Implementasi

SUMMARY

This research is motivated by Law no. 11 of 2009 concerning Social Welfare which has established policies and programs regarding the implementation of social welfare. In article 15, it is stated that regarding social assistance provided to families by the government, it is intended to prevent and handle the risk of social shock and vulnerability for individuals, families, groups and/or communities so that their survival can be fulfilled in accordance with minimum basic needs. Based on this law, to improve the social welfare of the Indonesian people, the government finally issued Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program. It explains that to improve the quality of life of poor and vulnerable families through increasing accessibility to Health, Education and Social Welfare services, it is necessary to have a planned, targeted and sustainable social protection program.

The aim of this research is to find out and analyze in more depth the implementation of the Family Hope Program in Sumampir Village, North Purwokerto District. The method used in this research is qualitative. The selection of informants used purposive sampling technique. Data collection through interviews, documentation and observation.

The research results show that the implementation of the Family Hope Program in Sumampir Village, North Purwokerto District has gone quite well, but is not yet optimal. The communication that exists between the companion and KPM is very good, the responsibilities and performance of the companion and KPM are also going well. However, there are still several shortcomings such as a lack of adequate resources and infrastructure, namely related to infrastructure in implementing P2K2.

Keywords: PKH, Kualitatif, Implementation